

Analisis Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Yusup Trifaldo¹⁾, Eva Susanti²⁾, Herni Ramayanti³⁾

¹²³⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja

Jl. Ki ratu Penghulu Karang Sari No.02301 Baturaja - 32115 OKU Sumatra Selatan

email: yusuptrifaldo@gmail.com¹⁾ evaftos@gmail.com²⁾ herniramayanti70@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The Regional Health Insurance Program (Jamkesda) is a local government policy aimed at providing healthcare coverage for communities that have not yet received adequate health protection. The implementation of the program still faces several challenges that affect the quality of healthcare services. These conditions highlight the need to examine the effectiveness of the Jamkesda Program. This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Health Insurance Program (Jamkesda) in improving the quality of healthcare services. The study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of program administrators, hospital staff, and program beneficiaries. Data analysis was based on the effectiveness indicators proposed by Makmur (2019), including target accuracy, implementation accuracy, the program implementation process, and the program's impact on the community. The findings indicate that the Jamkesda Program has been implemented quite effectively. The beneficiaries met the established eligibility criteria. Program implementation followed the applicable procedures. Service delivery improved public access to healthcare services. The program reduced the financial burden of medical expenses and increased access to healthcare services for the community. Several challenges remain, including limited budget allocation, inadequate program socialization, suboptimal coordination among related institutions, and administrative procedures that require longer processing time. The implementation of the Jamkesda Program requires stronger coordination, broader program socialization, improved administrative management, and enhanced program implementation to support higher-quality healthcare services.

Keywords: Program Effectiveness, Regional Health Insurance Program (Jamkesda), Service Quality, Healthcare Services.

ABSTRAK

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum memperoleh perlindungan kesehatan secara optimal. Pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Jamkesda. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola program, petugas rumah sakit, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis data mengacu pada indikator efektivitas menurut Makmur (2019), meliputi ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, proses pelaksanaan program, dan dampak program terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Program Jamkesda telah berjalan cukup efektif. Penerima manfaat telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan program mengacu pada prosedur yang berlaku. Proses pelayanan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Program memberikan manfaat berupa berkurangnya beban biaya pengobatan dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kendala masih ditemukan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi program, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan proses administrasi yang memerlukan waktu lebih lama. Program Jamkesda memerlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, pengelolaan administrasi, dan penguatan pelaksanaan program guna mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kualitas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, berkualitas, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun tingkat ekonomi. Upaya pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan diwujudkan melalui pembentukan sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa BPJS dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011).

Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu yang pembiayaannya dapat dibantu melalui program daerah atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024). Kehadiran program tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan data kepesertaan, perbedaan kemampuan fiskal pemerintah daerah, serta belum meratanya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam program nasional.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui program Sumsel Berkat dengan bekerja sama bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua sebagai rumah sakit rujukan utama. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin dan kurang mampu agar tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya pengobatan. Kehadiran Program Jamkesda diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya

masyarakat yang berada di wilayah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Berdasarkan data pelaksanaan Program Jamkesda Sumsel Berkat di RSUD Muaradua, jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 75 jiwa, kemudian meningkat menjadi 301 jiwa pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 565 jiwa pada tahun 2025 (RSUD Muaradua, 2025). Peningkatan jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa program Jamkesda memiliki kontribusi dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Selain itu, peningkatan jumlah peserta juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap program jaminan kesehatan daerah.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Jamkesda di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan. Beberapa masyarakat penerima manfaat mengeluhkan lamanya proses pelayanan, keterbatasan fasilitas kesehatan, prosedur administrasi yang cukup rumit, serta adanya perbedaan perlakuan antara pasien Jamkesda dan pasien umum. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterima melalui Program Jamkesda. Pelayanan yang belum optimal dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana Program Jamkesda telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Sumsel Berkat pada tingkat pelayanan rumah sakit daerah, khususnya di RSUD Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini tidak hanya melihat peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga mengkaji kualitas pelayanan, koordinasi pelaksanaan program, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kesehatan daerah. Penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas efektivitas program Jamkesda pada pelayanan kesehatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Jaminan Kesehatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD

Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siagian (2008) menjelaskan bahwa efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau mampu menghasilkan tujuan yang diinginkan. Tingkat efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Efektivitas juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam menentukan tujuan yang tepat serta melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian yang tinggi antara hasil dan tujuan menunjukkan bahwa suatu organisasi atau program berjalan secara efektif (Winarno, 2014).

Konsep efektivitas organisasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Efektivitas tidak hanya diukur berdasarkan jumlah hasil yang diperoleh, tetapi juga dilihat dari kualitas proses pelaksanaan, koordinasi antarbagian organisasi, serta dampaknya terhadap masyarakat sebagai penerima layanan (Dwiyanto, 2015). Organisasi publik dikatakan efektif apabila mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.

Pandangan lain menyebutkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan, serta sistem pelayanan yang diterapkan dalam organisasi (Sedarmayanti, 2017). Konsep tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target administratif, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, efektivitas dapat dipahami melalui beberapa dimensi utama, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian pelaksanaan program, pencapaian hasil, pemanfaatan sumber daya, dan dampak program terhadap masyarakat. Dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Muaradua Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

2.1.2 Teori-Teori Efektivitas

Teori efektivitas organisasi modern menjelaskan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur organisasi dalam bekerja sama secara harmonis dan produktif. Pelaksanaan Program Jamkesda membutuhkan koordinasi yang baik antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif (Makmur, 2019).

Teori kepemimpinan berbasis efektivitas organisasi menekankan pentingnya peran pemimpin dalam meningkatkan keberhasilan organisasi. Pemimpin yang mampu mengelola emosi, memberikan motivasi, dan mengarahkan sumber daya manusia secara tepat akan mendorong peningkatan efektivitas organisasi. Pelaksanaan Program Jamkesda sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan rumah sakit dan pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan kesehatan serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (Mulyadi, 2012).

Teori budaya organisasi menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh budaya kerja yang berkembang dalam organisasi. Budaya organisasi yang mendukung kerja sama, profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial akan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai. Pelayanan kesehatan yang didukung budaya pelayanan prima akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Jamkesda (Sutrisno, 2019).

Teori evaluasi efektivitas multi-konstituen memandang bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan formal organisasi, tetapi juga dari tingkat kepuasan para pemangku kepentingan. Penilaian efektivitas dapat dilihat melalui hubungan antara organisasi dengan masyarakat, pegawai, maupun pemerintah daerah sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Efektivitas Program Jamkesda dapat dinilai melalui tingkat kepuasan pasien, kualitas pelayanan rumah sakit, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (Dwiyanto, 2012).

2.1.3 Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas suatu program memerlukan indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator efektivitas untuk menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ketepatan sasaran digunakan untuk melihat sejauh mana Program Jamkesda diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat,

khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program dikatakan efektif apabila penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Ketepatan pelaksanaan menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini dapat dilihat melalui ketepatan administrasi, kesesuaian alur pelayanan, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan publik.

Proses pelaksanaan program menggambarkan bagaimana Program Jamkesda dijalankan mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan medis, hingga penyelesaian administrasi. Proses pelaksanaan yang baik ditandai dengan adanya koordinasi antarinstansi serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

Dampak program terhadap masyarakat menunjukkan perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya Program Jamkesda. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya akses pelayanan kesehatan, berkurangnya beban biaya pengobatan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Muaradua (Winarno, 2012).

2.1.4 Efektivitas Pelaksanaan Program

Efektivitas pelaksanaan program merupakan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari kesesuaian antara tujuan program dengan proses pelaksanaannya. Program yang efektif mampu berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penerima program.

Efektivitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan publik. Penilaian efektivitas dilakukan dengan melihat sejauh mana tujuan program dapat dicapai melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2015). Program yang efektif tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dapat dikatakan efektif apabila program mampu memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengurangi beban biaya pengobatan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Tingkat efektivitas program menunjukkan sejauh mana tujuan Program Jamkesda dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

2.2 Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat

yang belum tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kehadiran program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009).

Jamkesda hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pendanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses.

Tujuan utama Program Jamkesda adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala biaya pengobatan. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan akses pelayanan kesehatan sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan.

Jamkesda juga berfungsi sebagai program pelengkap (*complementary*) terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN atau mengalami kendala administrasi tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesda. Pelaksanaan program disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi fiskal masing-masing daerah sehingga mekanisme pelaksanaannya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pelaksanaan Program Jamkesda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan melalui kerja sama dengan RSUD Muaradua sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan utama. Rumah sakit memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat Program Jamkesda. Keberhasilan program dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kemudahan akses layanan, kualitas pelayanan kesehatan, ketepatan administrasi, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Efektivitas pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Muaradua menjadi penting untuk dikaji karena hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas administrasi program, serta memperkuat kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pelaksanaan program yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan

(Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2023).

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan tersebut dapat berbentuk pelayanan barang, jasa, maupun pelayanan administratif.

Konsep pelayanan publik berkaitan dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan melalui penyediaan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan berkualitas (Sinambela, 2017). Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Pelayanan publik dalam bidang kesehatan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil, merata, dan profesional melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga dari sikap petugas, kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima (Hardiyansyah, 2018).

Pelayanan publik yang baik ditandai dengan adanya profesionalisme aparatur, transparansi pelayanan, akuntabilitas, serta kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (Keban, 2019).

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi salah satu bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. RSUD Muaradua sebagai rumah sakit daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta Jamkesda secara profesional dan tanpa diskriminasi.

Efektivitas pelayanan publik di RSUD Muaradua dapat dilihat dari kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan memuaskan kepada masyarakat penerima manfaat Program Jamkesda. Pelayanan publik yang efektif akan menciptakan kepuasan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas Program Jamkesda di RSUD Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Informan penelitian terdiri dari pengelola Program Jamkesda, tenaga medis, petugas administrasi, dan masyarakat penerima manfaat Program Jamkesda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Program Jamkesda. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip dan dokumen terkait Program Jamkesda.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui efektivitas Program Jamkesda berdasarkan indikator ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, proses pelaksanaan program, dan dampak program terhadap masyarakat.

IV. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

RSUD Muaradua merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Rumah sakit ini mulai dibangun pada tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 sebagai rumah sakit tipe D yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya. Perkembangan rumah sakit terus mengalami peningkatan baik dari segi infrastruktur, pelayanan kesehatan, maupun administrasi. Tahun 2025, RSUD Muaradua melakukan revitalisasi dan pengembangan infrastruktur sebagai persiapan peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Visi RSUD Muaradua adalah “Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan yang mandiri dan bermutu tinggi.” Misi rumah sakit yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Struktur organisasi rumah sakit terdiri atas direktur, bagian tata usaha, bidang pelayanan medik dan keperawatan, bidang penunjang medis, serta bidang keuangan dan BLUD yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara terintegrasi.

Sumber daya manusia di RSUD Muaradua memiliki tingkat pendidikan yang beragam mulai dari SD hingga Strata 2 (S2). Berdasarkan data kepegawaian tahun 2026, pegawai didominasi oleh tenaga dengan pendidikan Diploma 3 dan 4 sebanyak 242 orang atau sebesar 48,11%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan vokasional memiliki peran penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Muaradua menunjukkan peningkatan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya. Tahun 2023 jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 75 jiwa, meningkat menjadi 301 jiwa pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 565 jiwa pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Program Jamkesda semakin dimanfaatkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Analisis hasil penelitian mengenai efektivitas Program Jamkesda di RSUD Muaradua difokuskan pada indikator ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, proses pelaksanaan program, dan dampak program terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan kesehatan.

4.2.1 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ketepatan sasaran menunjukkan sejauh mana program mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketepatan sasaran tidak hanya berkaitan dengan penentuan penerima manfaat, tetapi juga mencakup proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat secara berkala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat Program Jamkesda di RSUD Muaradua pada umumnya telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah. Sebagian besar penerima manfaat berasal dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan. Program Jamkesda dinilai cukup membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan yang tinggi.

Pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala dalam aspek pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Data penerima manfaat yang belum diperbarui secara berkala menyebabkan masih ditemukan masyarakat yang sudah tergolong mampu tetapi tetap menerima bantuan. Kondisi sebaliknya juga terjadi, yaitu terdapat masyarakat kurang mampu yang belum memperoleh akses pelayanan Jamkesda karena belum terdata secara optimal.

Mekanisme penentuan peserta Jamkesda dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan di tingkat RT/RW, desa atau kelurahan, hingga verifikasi oleh dinas terkait. Proses tersebut bertujuan memastikan bantuan pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pelaksanaan verifikasi di

lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan, kurang optimalnya validasi data, serta kemungkinan subjektivitas dalam proses pendataan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi memiliki pengaruh penting terhadap ketepatan sasaran program. Kerja sama antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, pemerintah desa, dan pihak rumah sakit diperlukan agar proses penentuan penerima manfaat dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Kurangnya koordinasi menyebabkan keterlambatan pembaruan data serta ketidaksesuaian informasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Perspektif masyarakat menunjukkan bahwa Program Jamkesda telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat menilai program membantu mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau. Akan tetapi, masyarakat juga masih menemukan adanya penerima manfaat yang dinilai kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan anggapan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya adil dan merata.

Menurut Budiani, ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator keberhasilan program yang menunjukkan sejauh mana penerima manfaat sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditentukan. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat Program Jamkesda telah sesuai dengan kriteria masyarakat kurang mampu meskipun masih ditemukan beberapa ketidaktepatan sasaran akibat keterbatasan data dan proses verifikasi.

Riant Nugroho menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh akurasi data dan ketepatan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data penerima manfaat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda. Data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menyebabkan bantuan diterima oleh masyarakat yang kurang tepat, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran Program Jamkesda di RSUD Muaradua secara umum sudah cukup baik karena sebagian besar penerima manfaat berasal dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan dalam aspek validitas data, pembaruan data penerima manfaat, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi agar bantuan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

4.2.2 Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan menunjukkan sejauh mana Program Jamkesda dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program mencakup pelayanan administrasi, pelayanan medis, serta koordinasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Muaradua pada umumnya telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah. Pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan cukup baik.

Pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan administrasi, antrean pelayanan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan pada waktu tertentu belum berjalan secara optimal.

Koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan Program Jamkesda pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Kendala masih ditemukan dalam proses pertukaran data dan sinkronisasi informasi sehingga terkadang mempengaruhi kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur pelayanan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Masyarakat menilai bahwa Program Jamkesda cukup membantu dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengobatan. Proses administrasi dinilai masih perlu disederhanakan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan efisien.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak rumah sakit telah berupaya memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan status sosial pasien. Komitmen tersebut terlihat dari pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tetap mengacu pada standar pelayanan publik dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Muaradua sudah berjalan cukup efektif. Pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan dalam aspek administrasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

4.2.3. Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Muaradua pada umumnya telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pelayanan dimulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi data, hingga pelayanan medis kepada pasien. Prosedur pelayanan yang jelas membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan lebih tertib dan mudah dipahami. Pelaksanaan pelayanan juga didukung oleh kerja sama antara tenaga medis dan tenaga administrasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien peserta Jamkesda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Program Jamkesda sudah cukup baik dan tidak terlalu berbelit-belit sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Proses pelayanan yang jelas membantu pasien mendapatkan pelayanan medis

sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan tenaga medis juga dinilai cukup baik dalam memberikan pemeriksaan dan penanganan kesehatan kepada pasien.

Pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti antrean pasien yang cukup panjang, lamanya proses administrasi, serta keterbatasan tenaga pelayanan ketika jumlah pasien meningkat. Sebagian masyarakat juga masih belum memahami secara menyeluruh prosedur penggunaan Jamkesda sehingga sering datang dengan dokumen yang belum lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lambat dan mempengaruhi kenyamanan pasien.

Koordinasi antara tenaga medis dan tenaga administrasi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelayanan. Kerja sama yang baik dapat membantu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi kesalahan administrasi. Sikap ramah dan responsif dari petugas juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama menjalani proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD Muaradua dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek administrasi, penambahan tenaga pelayanan, serta penyederhanaan prosedur agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan cukup efektif dalam membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

Program ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam membantu mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi program, proses administrasi yang cukup lama, dan antrean pelayanan yang panjang.

SARAN

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi Program Jamkesda kepada masyarakat.
2. Pihak rumah sakit perlu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi agar proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar program tepat sasaran.
4. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jamkesda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2023. *Laporan Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)*. Muaradua: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Makmur. 2019. *Efektivitas Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, D. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, Edi. 2019. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.